BAB V

PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

A. PENGERTIAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

UMKM saat ini dianggap menjadi suatu pondasi dalam perekonomian Indonesia. Secara makro terlihat bahwa sektor UMKM memiliki potensi yang besar secara keseluruhan, kontribusi UMKM terhadap PDB pada tahun 2006 mencapai 53,3%, yang berarti bahwa sektor UMKM memberikan lebih dari separuh dukungan bagi pergerakan ekonomi Indonesia saat ini. Rekrut karyawan, pada tahun 2006, UMKM berhasil menyerap 59,5 juta tenaga kerja atau mencapai 97,3% dari jumlah angkatan kerja.

Meskipun UMKM memiliki peranan yang penting untuk membangun ekonomi, sektor terus memperoleh hambatan untuk mengembangkannya. Meliputi pengembangan akses pemasaran serta produk, SDM, bentuk badan hukum yang non formal, serta permasalahan modal. Akses masalah lanjut yang dialami UMKM yaitu aturan yang berlaku pada Negara tujuan ekspor, cara kontrak penjualan, permasalahan hukum terkait hak paten, minimnya pemahaman terkait desain pokok yang selaras pada karakter pasar, penetrasi pasar ekspor yang belum maksimal, serta pengenalan. Masalah antara yakni masalah dari perusahaan yang berkaitan guna memecahkan permasalahan dasar supaya bisa menyelesaikan permasalahan lanjut dengan lebih baik. Masalah itu misalnya mengenai hal manajemen keterbatasan untuk berwirasusaha, keuangan, dan agunan.

1. Usaha Mikro

a. Pengertian usaha mikro

Usaha mikro ialah sebuah usaha yang dijalankan sejumlah keluarga ataupun satu orang yang belum mempunyai isi usaha dengan lengkap. Definisi lain yang dipaparkan Warkum Sumitro UMKM yaitu usaha yang dilaksanakan perusahaan menggunakan karyawan yang dipakai tidak lebih dari lima puluh individu.

UMKM adalah sebagian besar dari usaha kecil seperti usaha souvenir, pedagang kaki lima, kerajinan tangan, serta lainnya.¹⁴

Berdasarkan Undang-Undang pada No.20 tahun 2008 terkait UMKM yaitu unit usaha mikro ialah usaha yang memiliki aktivitas produk yang dikelola individu per individu ataupun badan usaha perorangan yang memiliki ciri-ciri usaha mikro seperti yang tertuang pada Undang-Undang No.20 tahun 2008.¹⁵ Tipe usaha mikro meliputi:

- 1) Mempunyai aset bersih terbanyak Rp50 juta rupiah, tidak merupakan pada bangunan ditempat usaha beserta tanah.
- 2) Mempunyai penghasilan dari penjualan tahunan terbanyak Rp300.000.000,00 rupiah.¹⁶

b. Karakteristik usaha mikro

Usaha skala mikro adalah bagian integral dan penting guna ditingkatkan sebab bisa dijadikan alternatif untuk urban dan akhirnya bisa mendukung pengontrolan pengaruh negative urbanisasi, pada kota besar. Sesuai dengan data tahun 2007 jumlah pengusaha mikro berkisar 48,302 juta unit/96,70 persen dari semua jumlah pengusaha yang terdapat pada Indonesia.

Karakteristik usaha mikro yakni:

- 1) Akses sumber daya

Usaha mikro yaitu pengusaha yang dikarakteristikan dengan mengakses pada sumber daya yang sedikit. Umumnya jumlah pengusaha dinilai tidak eksis sebagai usaha yang resmi. Mereka mempunyai akses yang tidak besar pada proteksihukum atau layanan pemerintah pada usaha. Konsekuensi kasus yang tidak resmi yaitu menghindari dari monitoring pemerintah serta hal tersebut bisa menambah biaya transaksi serta operasi dan kemudian meminimkan askes mereka pada konsumen.

¹⁴ Noer sasongko, "tata kelola keuangan yang baik bagi umkm" seminar nasional & seminar bisnis magister manajemen" (SAMBIS) ISSN: 2685-1474, 2019, hlm. 288.

¹⁵ Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2008, tentang usaha mikro, kecil, dan menengah.

¹⁶ Pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia, No. 20 tahun2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah.

Produksi skala mikro masih memiliki orientasi terhadap karyawan. Teknologi produksi yang dimilikinya masih sedikit pelatihan yang mereka dapatkan relative kurang. Sehingga, akses mereka pada bahan baku yang bisa memberikan pengaruh pada biaya. Namun skala mikro bisa menjadi sangat kompetitif sebab kompetensinya memakai pekerja yang murah serta terhindari dari pajak. Bukti sudah memperlihatkan jika sektor mikro bisa dijadikan inovasi serta energi pada penumbuhan jiwa kewirausahaan. Hal tersebut ternyata akan bisa mempercepat peningkatan sosial ekonomi sebuah wilayah.

2) Kepemilikan usaha mikro

Usaha skala mikro dilakukan pengelolaan oleh keluarga atau perorangan serta akhirnya memiliki peranan penting untuk ekonomi keluarga. Tetapi, terdapat sebagian kecil ada yang diberikan guna dikelola individu lain. Pendapat utama usaha skala mikro adalah penunjang pokok guna mencukupi kebutuhan keluarga tidak hanya sekedar usaha sampingan baik dijalankan suami ataupun istri.

3) Peran usaha mikro

Sebagian besar dari skala usaha mikro ini mengambil karyawan di bawah lima orang, namun hamper seluruhnya menyerap lebih dari satu individu semua unit usaha mikro. Terdapat pula usaha mikro yang telah mengalami perkembangan bisnisnya yang menyerap keryawan antara 5 sampai sepuluh individu. Sebab itu, jika usaha skala mikro berkembang serta tumbuh secara baik akan menyerap karyawan dengan cara signifikan.

Skala mikro timbul menjadi sebuah yang dibutuhkan dalam perekonomian serta pertumbuhan dalam perekonomian. yang tidak lambat diiringi arus urbanisasi menyebabkan banyaknya jumlah kompetisi dan akhirnya mengakibatkan lebih kecil kesempatan guna memperoleh pekerjaan di sector resmi. Guna bertahan para karyawan yang tidak terserap oleh kapasitas kesempatan akan membuat pekerjaanya.

4) Kelembagaan usaha mikro

Ciri-ciri umum yang terdapat pada usaha skala mikro ini tanpa mempunyai linsensi formal ataupun kelembagaan ataupun izin melalui lembaga yang berwewenang dan akhirnya bergerak dengan tidak resmi. Tidak untuk usaha mikro guna bisa mengakses asal dana, baik dana melalui badan keuangan, seperti koperasi, perbankan, ataupun dana melalui program pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah

Dikemungkinan bahwa pengaruh dengan tidak terdapatnya suatu hukum yaitu tidak bisa melaksanakan kerja sama seperti, menjadi subkontraktor untuk pemerintahan daerah serta perusahaan, dan akhirnya ia kesulitan guna menjadi pemasok untuk usaha besar. Padahal, kompetensi skala mikro untuk memakai karyawan menjadikan usaha skala ini aktraktif.

5) Kelayakan usaha

Untuk memahami kelembagaan usaha skala mikro, bisa dilihat dari sejumlah aspek diantaranya, dukungan pemerintah, usaha sekitar, produk pengganti, permintaan barang, proses pengembangan, sifat usaha, distributor, teknologi, serta mode produksi.

Pemakaian teknologi untuk melaksanakan produksi sebagian besar masih memiliki sifat sederhana. Walaupun memakai teknologi sederhana, usaha mikro tetaplah membutuhkan terdapatnya tahap pembelajaran untuk mendayagunakan teknologi itu dari pemagangan, pendampingan, advokasi, serta pelatihan.

2. Usaha Kecil

a. Pengertian usaha kecil

Terjadinya ketidaksamaan argumen untuk mengartikan usaha mikro sebab perbedaan untuk menetapkan suatu usaha tersebut dalam skala kecil jika dikaitkan dengan usaha besar serta menengah. Ketidaksamaan itu dikarenakan perbedaan untuk memberikan skala kecil pada usaha. Setiap negara tidak sama guna memberikan skala usaha kecil. Di Indonesia usaha kecil

seringkali dikaitkan dengan pemberdayaan usaha kecil. Berarti usaha kecil harus sesuai dengan kriteria di bawah ini :

- 1) Memenuhi aset bersih terbanyak Rp200 juta tidak termasuk tempat pembangunan usaha serta tanah.
- 2) Mempunyai hasil penjualan tahunan terbanyak Rp1 miliar.
- 3) Milik WNI, berdiri sendiri tidak merupakan cabang ataupun anak perusahaan yang secara tidak langsung ataupun langsung dimiliki, dikendalikan atau dihak kuasai, serta terkait dengan perusahaan besar menengah.
- 4) Bentuk usaha koperasi, perorangan, serta badan usaha berbadan non hokum ataupun yang berbadan hukum.

Pada UU Nomor 20 tahun 2008 terkait UMKM, bahwa unit usaha kecil yaitu unit usaha yang sesuai dengan kriteria:

1. Aset bersih di atas Rp50 juta hingga Rp500 juta, tidak merupakan tempat pembangunan usaha serta tanah.
2. Penghasilan dari penjualan tahunan di atas Rp300 hingga Rp2,5 miliar.

Sesuai pemaparan musa hubies, usaha kecil yang betuk-betuk mikro serta kecil bisa dibedakan menjadi:

- 1) Usaha kecil mandiri, yakni tidak memperkerjakan karyawan lain.
- 2) Usaha kecil yang memperkerjakan karyawan anggota keluarga sendiri.
- 3) Usaha kecil yang memperkerjakan karyawan gaji yang tetap.

Usaha kecil sebagaimana kategori yang dimaksud yaitu yang seringkali dianggap sebagai bisnis yang mengalami banyak kesukaran, terutama berkaitan dengan sedikitnya kemampuan manajerial, permodalan yang tidak memadai, kualitas produk, Sumber Daya Manusia, pemasaran, serta teknologi. Factor eksternal pada usaha kecil adalah kendala yang tidak mudah diselesaikan, yakni tatanan pasar yang tidak sehat serta berkembangnya perusahaan asing yang menciptakan prosuk serupa guna segmen pasar yang tidak berbeda.¹⁷

¹⁷ Muslimin Kara, "Kontribusi pembiayaan perbankan syariah terhadap pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di kota makassar" Jurnal ilmu syariah dan hukum, vol. 47 No. 1 juni 2003 hlm. 279

b. Karakteristik usaha kecil

Sesuai pemaparan Suharto prawirokusumo, ciri-ciri usaha kecil adalah:

- 1) Umumnya usaha kecil dijalankan oleh pemiliknya dan kemudian dinamakan owner manager yaitu atasan yang memberikan bimbingan pada bebrapa karyawan yang tidak banyak serta tidak diwajibkan menjalankan bisnis. Mereka dinamakan manajemen team yang memiliki asal dari teman dekat, sanak saudara, ataupun anggota family.
- 2) Usaha kecil umumnya hanya memiliki *single product line* tidak diversifikasi usaha.
- 3) Penanggung jawab penentuan keputusan umumnya dikelola oleh satu individu.
- 4) Hubungan antara manajemen dan pekerjaanya memiliki sifat sangat erat.
- 5) Umumnya organisasi usaha tanpa terdapatnya spesialisasi fungsional.
- 6) Pada system pelaporan tidak bertingkat pula.
- 7) Kurang memiliki long tern planning.
- 8) Umumnya tidak untuk umum.
- 9) Lebih memiliki orientasi pada survival guna menjaga *awnwer's equity* dibandingkan dengan provit maximisasi.
- 10) Tidak dominan pada pasar.

Sesuai pemaparan, bernadie, Bastian Bustami, Amelia Sandra, nurlela, Amelia Sandra, serta very N idrus ciri-ciri usaha kecil yaitu:

- 1) Sukarnya mendapatkan modal jangka panjang
- 2) Kemampuan yang kurang
- 3) Angka kegagalan sangatlah besar
- 4) Pemilik mengenali masing-masing pekerja
- 5) Susunan organisasi sederhana
- 6) Biasanya dijalankan oleh pemiliki sendiri.

c. Perberdayaan usaha kecil

Mengenai sejumlah permasalahan serta kekurangan usaha kecil di atas harus memperoleh perhatian guna mencari penyelesaiannya untuk pemberdayaan usaha kecil guna

memperkuat ekonomi Indonesia. Berdasarkan pasal 14 UU Nomor 9 tahun 1995 terkait usaha kecil memaparkan jika Masyarakat, pemerintah, serta dunia usaha membina serta mengembangkan usaha kecil pada bidang pengolahan serta produksi, teknologi beserta desain, SDM, dan pemasaran..¹⁸

Dijelaskan lebih mendalam pada pasal 15 serta 14 Undang-Undang Dasar terkait usaha kecil, bahwa pemerintah masyarakat serta dunia usaha membina dan mengembangkan bidang pengolahan serta produksi secara ;

- 1) Meningkatkan kemampuan manajemen dan pengolahan serta tehnik produksi
- 2) Mengembangkan kompetensi perekayasaan serta rancang bangun
- 3) Memberikan kemudahan untuk pelaksanaan sarana prasarana pengolahan serta produksi, kemasan, bahan penolong, serta bahan baku.

Begitu pula pada bidang pemasaran harus dituliskan langkah-langkah pengembangan serta pembinaan, baik dilakukan di luar ataupun dalam negeri. Langkah itu diraih melalui pengadaan penelitian serta pengkajian pemasaran dan memberikan sarana dan dukungan promosi serta uji pasar untuk usaha kecil. Disamping itu dimaksudkan pula guna meningkatkan lembaga pemasaran dari jaringan distribusi, dan memasarkan produk usaha kecil.

Berdasarkan pasal 17 dituliskan beberapa langkah terkait pengembangan serta pembinaan pada bidang SDM yaitu:

- 1) Membudidayakan kewirausahawan dan kemasyarakatan.
- 2) Mengembangkan kemampuan manajerial serta teknis.
- 3) Mengembangkan serta membentuk konsultasi usaha kecil, pelatihan, serta lembaga pendidikan.
- 4) Memberikan tenaga konsultasi serta penyuluhan usaha kecil.

Mengembangkan serta menanamkan semangat dan prilaku kewirausahawan harus dilakukan dengan, kemampuan serta kemauan guna bekerja untuk kebersamaan berdasarkan

¹⁸ Pasal 14 Undang-Undang No. 9 tahun 1995 tentang usaha kecil

pada etika bisnis yang sehat, berani mengambil resiko, menetapkan keputusan dengan sistematis, kemampuan serta kemauan guna menyelesaikan permasalahan, kemampuan serta kemauan guna bekerja menggunakan semangat kemandirian, serta kemampuan serta kemauan bertindak dan berfikir dengan inovatif serta kreatif.

Kecuali langkah-langkah tersebut, sejumlah langkah yang bisa mengembangkan usaha kecil, yakni:

- 1) Pendekatan makro guna membuat iklim usaha yang kondusif untuk tumbuh serta kembangnya usaha kecil, diantaranya penyediaan barang public yang lebih.
- 2) Memiliki orientasi terhadap peningkatan usaha kecil misalnya fasilitas infrastruktur.
- 3) Meningkatkan hubungan antara usaha besar dengan usaha kecil didasarkan saling memberikan keuntungan antar pihak.
- 4) Usaha kecil perlu pula mengembangkan efisiensi usaha.
- 5) Untuk sector usaha kecil yang belum memiliki asosiasi harus dibentuk asosiasi.
- 6) Posisi usaha kecil pada struktur perekonomian.

Memahami permasalahan usaha kecil juga harus diamati keadaan posisi usaha kecil di perekonomian yang lebih luas. Pada kondisi ekonomi yang timpang, usaha kecil berperan sangatlah penting yaitu pada penyerapan karyawan yang tersedia. Adanya jumlah angkatan kerja yang terus mengalami penambahan sektor usaha kecil semoga bisa menyerap karyawan, mengetahui sektor lain misalnya sektor formal serta pertanian sangatlah terbatas kompetensinya untuk menyerap karyawan. Sektor akan memberikan peluang berpenghasilan untuk beberapa karyawan yang berganti dari sektor tidak pertanian pedesaan kesektor perkotaan.

Bisa diperkirakan jika penyerapan pokok karyawan bisa berganti dari sektor pertanian pedesaan ke sektor tidak pertanian perkotaan. Meskipun jumlah karyawan yang paling besar ada di sector pertanian dalam keadaan itu peranan usaha kecil untuk penyerapan karyawan menjadi semakin penting. Potensi bisnis-bisnis guna menghasilkan nilai tambah akan

menetapkan sebesar apa basis ekonomi Indonesia serta daya beli bisa dikembangkan. Contohnya yaitu tingkatan penghasilan yang ditawarkan oleh sektor tidak resmi yang produktif bisa dinyatakan cukup banyak.

3. Usaha Menengah

Usaha menengah yaitu aktivitas ekonomi yang dilaksanakan keluarga ataupun satu orang ataupun sebuah badan yang memiliki tujuan guna menciptakan jasa ataupun produk guna diperjual belikan dengan komersial serta memiliki omset penjualan di atas Rp1 miliar. Pada UU Nomor 20 tahun 2008 terkait UKM memaparkan yaitu perusahaan menengah merupakan perusahaan pada perekonomian produktif yang mandiri, dan juga dioperasikan oleh individu atau badan usaha yang terdapat cabang ataupun anak dari perusahaan yang telah dihak kuasai, dimiliki atau tidak langsung oleh perusahaan kecil ataupun besar dengan total kekayaan bersih, seperti yang tertuang pada UU.

UU itu menjelaskan bahwa tipe-tipe pada usaha menengah itu ialah:

- a) Mempunyai aset kekayaan bersih lebih dari Rp500 juta - Rp10 miliar tidak termasuk bangunan serta tanah.
- b) Mempunyai penghasilan dari penjualan tahunan di atas Rp2.5 milyar hingga Rp50 milyar.¹⁹

Adanya usaha di konstelasi perekonomian nasional mempunyai arti penting serta sangatlah strategi guna memediasi ketimpangan penguasaan ekonomi, antara usaha kecil dan usaha besar maupun mikro. Karena kedudukannya pada sejumlah sisi ada antara pengusaha kecil serta pengusaha besar. Pada profil usaha di Indonesia yang didapatkan dari Musa Hubies jumlah usaha menengah yakni 361.052 unit / 0.86 persen dengan peluang kerja 10,54 persen dari peluang kerja nasional. Meskipun sedikit namun sangatlah berarti jika dibandingkan antara usaha makro serta kecil dengan usaha besar. Jumlah usaha kecil serta mikro

¹⁹ Pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

yakni 43.406.395 unit (99,43%) dengan peluang kerja 89,22%, dan usaha besar 3.228 (1,19%) dengan peluang kerja 0,5.

4. Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perspektif Islam

a. Pengertian usaha mikro perpektif islam

Didalam agama Islam melakukan bisnis tersebut merupakan hal yang tidak diharamkan. Bisa dipahami jika Nabi Muhammad SAW, dulunya merupakan seorang pedagang serta bisa pula kita melihat terdapat banyak sahabat Nabi pada zaman dahulu yang pembisnis yang sukses serta mempunyai sumber modal yang sangatlah banyak. Manusia diciptakan di muka bumi. Dalam menjalankan hal itu tentulah dalam hal tata pengelolaan ini sudah menjadi suatu hal yang sudah dititipkan oleh Allah. Usaha dizaman sekarang ini umumnya dinamakan dengan berwirausaha.

Dalam Islam UMKM adalah suatu aktivitas melalui bisnis guna mempertahankan hidupnya serta melakukan ibadah menuju kesejahteraan sosial. Perintah tersebut berlaku untuk seluruh manusia dan tidak membedakan jabatan, pangkat, serta status manusia, di Al Quran dituliskan pada Surah At Taubah (9): ayat 105

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُوَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عِلْمِ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: *“Dan katakanlah; bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakanNya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”*.²⁰

Berdasarkan atas Al-Qur’an surah At-Taubah Ayat:105 diatas. Menjelaskan bahwasannya Allah serta Rasulnya selalu memberikan perintah pada umatnya untuk bekerja, dan dari semua pekerjaanya Allah dan Rasulnya akan selalu mengamati

²⁰ Al-Qur’an Surah At-Taubah (9): Ayat 105

pekerjaan semua manusia. Ini merupakan amalan yang akan beri tanggung jawab pada hari akhir nanti.

Surah tersebut menjelaskan bahwasannya Allah SWT serta Rasulullah memerintahkan pada umat manusia guna bekerja, semua pekerjaan manusia akan selalu di amati Allah serta Rasulnya sebagai amalan yang akan dipertanggung jawabkan di hari kiamat.

Mujahid memaparkan bahwa hal tersebut adalah ancaman dari Allah pada manusia yang melawan perintah Allah bahwa amal tindakan mereka nanti akan di tampilkan dihadapan Allah, Rasulnya, dan manusia-manusia mukmin. Hal tersebut pastilah akan terjadi nanti di hari akhir, seperti yang difirmankan Allah SWT.

b. Karakteristik usaha mikro menurut perspektif islam

Berdasarkan islam, sudah ditetapkan prosedur yang melakukan sosialisasi antar individu kaitannya dengan Allah Swt. Aturan main yang berkaitan pada hukum pada semua aspek kehidupan meliputi kegiatan usaha, supaya manusia Muslim bisa terus mengontrol perbuatannya serta tidak masuk kedalam kesesatan. Adapun karakteristik usaha mikro dalam perspektif Islam, yakni:

- 1) Usaha mikro pengaruhnya memiliki sifat ketuhanan, mengetahui dasar aturannya yang tidak diletakkan oleh orang, namun diletakkan pada peraturan yang sudah ditentukan Allah Swt. Seperti yang tertuang pada Al Quran beserta As Sunnahnya.
- 2) Usaha mikro berdimensi akidah, mengetahui ekonomi Islam umumnya lahir dari akidah islamiah yang dalamnya akan dipertanggung jawaban pada akidah yang dipercayainya.
- 3) Memiliki karakter ta'abbudi, mengetahui usaha mikro islam tersebut adalah aturan yang memiliki dimensi ketuhanan.
- 4) Objektif, Islam memerintahkan umatnya agar bertindak objektif ketika melaksanakan aktivitas ekonomi. Kegiatan ekonomi hakikatnya adalah melaksanakan amanat yang wajib dipenuhi semua pelaku ekonomi tanpa membedakan

kepercayaan, agama, etnik, warna kulit, jenis kelamin, serta lainnya.

- 5) Realistis, perkiraan ekonomi terkhusus perkiraan bisnis tidak selalu selaras dengan praktik di satu sisi dan teori di sisi lainnya.²¹

B. PERAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

Terdapat 3 alasan Negara guna mendukung usaha kecil guna terus berkembang. Alasannya ke-1 yaitu usaha kecil cenderung mempunyai pencapaian yang bagus mengenai hal yang menghasilkan tenaga kerja yang produktif. Selanjutnya alasan ke-2, sering meraih pengembangan produktivitasnya dari perubahan teknologi serta menanam modal. Hal tersebut adalah bagian dari dinamika usahanya yang selalu menyelaraskan kemajuan zaman. Alasan ke-3 yakni, usaha kecil mempunyai kelebihan di hal fleksibilitas daripada perusahaan besar. Usaha mikro memiliki peran penting untuk pembangunan ekonomi bangsa terkhusus pada ekonomi masyarakat sekitar guna mencukupi kebutuhannya untuk masa depan.

Berdasarkan hal ini peranan usaha mikro sangatlah penting pada aktivitas ekonomi masyarakat. Di bawah ini peranan usaha mikro berdasarkan departemen koperasi:²²

- 1) Untuk pemeran utama pada aktivitas ekonomi
- 2) Penyedia lapangan kerja paling besar
- 3) Pelaku penting pada aktivitas ekonomi lokal serta pemberdayaan masyarakat
- 4) Pencipta sumber ekonomi beserta pasar baru.
- 5) Kontribusinya pada Negara pembayaran.

²¹ Hj. Sastro Wahdino, "*Ekonomi Mkaro dan Mikro Islam*", (Jakarta: PT. Dwi Chandra Wacana, 2001), hlm. 52

²² Siti Susana "*Peranan Home Industry dalam Meningkatkan kesejahteraan masyarakat*", (Program ekonomi Islam, Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau), 2012, hlm. 98

Tidak bisa disangka UMKM memiliki peran penting untuk Negara guna mengembangkan ekonomi sebuah negara. Indonesia sejak mengalami krisis finansial di 1996, masih banyak UMKM sekarang ini masih bisa bertahan. Walaupun mereka goyang dari pengaruh yang diciptakan tetapi dengan semangatnya serta jiwa yang kuat, akhirnya mereka dengan perlahan-lahan bisa bangkit kembali serta berguna untuk Negara serta masyarakat.

Sesuai pemaparan Adnan husada penerapan ekonomi kerakyatan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat serta pembangunan ekonomi. Wujud nyata melalui ekonomi kerakyatan yakni dorongan pada usaha mikro kecil menengah, akhirnya hasil produksi usaha kecil serta menengah bukan hanya diperjual belikan pada pasar lokal namun luar daerah serta bertambah berkembang. Terlebih lagi didukung dengan pendayagunaan teknologi informasi, dan pemasaran ulang produk kembali dibatasi oleh waktu dan tempat. Tidak hanya pemerintah, perusahaan komunitas dan dorongan pemerintah juga dapat memberikan cara baru bagi masyarakat yang ingin memulai usaha dari usaha kecil menengah. Munculnya komunitas yang berpartisipasi dalam bisnis baru atau mengembangkan bisnis yang ada dan memberikan kesempatan kerja baru bagi komunitas. Adanya peranan UMKM itu bisa mengembangkan pembangunan ekonomi serta kesejahteraan rakyat.²³

C. PEMBIAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

1. Pembiayaan usaha kecil mikro

Sesuai pemaparan hafshah, usaha kecil merupakan aktivitas ekonomi masyarakat yang beskala kecil memiliki aset bersih terbanyak Rp200 juta tidak merupakan pembangunan tempat usaha serta tanah atau memiliki hasil dari penjualan tahunannya terbanyak Rp1 Miliar. Pemberian produk

²³ Adnan Husada "Peran UMKM dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat kabupaten blora", Jurnal analisis sosiologi, Vol.5, No.2 Desember:2011, hlm.41

pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang bisa digunakan oleh UMKM dapat mengatasi permasalahan modal bagi usahanya.²⁴

Sesuai akan pada Undang-Undang No. 20 tahun 2008 terkait UMKM pemerintah menciptakan iklim usaha secara menampakkan aturan UU serta kebijakan yang salah satunya antara lain aspek pendanaan untuk membantu pelaku UMKM guna memperoleh pembiayaan barang atau jasa keuangan yang disediakan bank.²⁵

Di Indonesia, kriteria usaha penting dibedakan guna menetapkan peraturan yang berkaitan. Skala usaha dibagi menjadi usaha besar, usaha kecil, usaha mikro, serta usaha menengah. Awali Rizki memaparkan jika usaha makro ialah usaha tidak resmi yang mempunyai omzet, aset, modal yang tidak besar. Pembiayaan UMKM merupakan pembiayaan untuk modal kerja yang didasarkan pada prinsip syariah guna membantu pedagang usaha mikro kecil untuk mengembangkan usahanya.

Kriteria usaha kecil mikro selaras pada perundang-undangan No. 20 tahun 2008 pasal 6, yaitu:

- a) Mempunyai aset kekayaan bersih terbanyak lima puluh juta, tidak merupakan tempat pembangunan usaha serta tanah.
- b) Mempunyai pendapatan dari hasil penjualan tahunan terbanyak tiga ratus juta rupiah.²⁶

2. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah

- a) Prinsip bagi hasil
 - 1) Musyarakah

Musyarakah adalah perjanjian kerja sama pembiayaan antara sejumlah lembaga keuangan dengan bersama-sama, serta nasabah guna mengelola sebuah aktivitas usaha. Semuanya memasukkan penyertaan modal selaras pada porsi yang diperjanjikan. Pengelolaan aktivitas usaha dipercayakan pada nasabah. Pengelola nasabah wajib

²⁴ Rizki Tri Anugrah Bhakti "*pemberdayaan UMKM melalui dengan Prinsip bagi hasil*", Arena HUKUM, Vol. 6 No. 1 April 2013, hlm. 129

²⁵ Rizki Tri Anugrah Bhakti, *Ibid*, hlm. 132

²⁶ Pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah.

menginformasikan laporan terkait perkembangan bisnis pada bank syariah selaku pemilik dana.

2) Mudharabah

Mudharabah merupakan perjanjian kerja sama yang memberikan semua kebutuhan modal, serta pengelola usaha guna melaksanakan sebuah aktivitas usaha bersama keuntungan yang didapatkan dibagi berdasarkan perbandingan yang disepakati. Pemodal tidak ikut campur untuk pengelolaan usaha, namun berhak guna mengawasi.

b) Prinsip jual beli

1) Murabahah

Pada pembiayaan ini bank selaku pihak pemberi dana pada kativitas transaksi murabahah dengan nasabah. Bank menyediakan yang diperlukan oleh nasabah dengan membeli barang menggunakan tarif yang lebih banyak. Pembayaran terhadap transaksi murabahah bisa dilaksanakan secara membayar serta ketika jatuh tempo ataupun melaksanakan pembayaran angsuran pada jangka watu yang ditetapkan.

2) Istishna'

Pembiayaan istishna' yaitu pembiayaan talangan dana yang diperlukan nasabah guna membeli jasa ataupun produk dengan pembayaran diawal, ditangguhkan, ataupun dicicil. Bank syariah bertindak menjadi penyedia dana pada aktivitas transaksi istishna' dengan nasabah, serta pembayaran ke bank tidak dapat berupa keringanan utang dari nasabah ke bank.²⁷

²⁷ Zaim Nur Alif, Imron Mawardi "*pengaruh pembiayaan terhadap laba melalui variable inventing pembiayaan bermasalah bank umum sayriah di Indonesia periode 2009-2013*", (Universitas Airlangga), JESTT Volume 1 Nomor. 8 Agustus 2014, hlm. 568

D. KENDALA PEMBIAYAAN SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

Meskipun bank syariah mempunyai berbagai macam keunggulan serta kelebihan untuk menggerakkan laju perekonomian yaitu sektor UMKM tetapi harus dipahami jika dampak bank syariah pada perkembangan ekonomi nasional hanya 0,23 persen atau di bawah 1 persen. Berdasarkan analisis bank Indonesia yaitu bank syariah pada perkembangan ekonomi nasional bahkan bisa memberikan pengaruh terhadap inflasi apabila peranan bank syariah pada perkembangan ekonomi nasional kira-kira antara 10%-20%.

Adapun kendala-kendala yang menghambat pembiayaan syariah untuk memaksimalkan pengembangan UMKM, yakni:

- 1) Masih kurangnya sumber daya manusia untuk memahami aspek keuangan dan keuangan Indonesia. Pertumbuhan bank domestik Indonesia tidak memiliki sumber daya yang cukup. Bank syariah, terutama bank konvensional yang mendirikan cabang syariah dalam konteks ekonomi konvensional, dan sebagian besar sumber daya yang tersedia yang pada akhirnya menerapkan syariat Islam untuk percepatan perkembangan bisnis perbankan, tidak dapat beradaptasi dengan cepat dalam sistem perbankan sehingga terjadi penghambatan.
- 2) Sosialisasi terkait bank syariah yang minim yang paling utama pada rakyat golongan bawah selaku pemegang peranan penting sektor UMKM.
- 3) Minimnya aktifnya bank syariah untuk pembiayaan.
- 4) Masih tertinggalnya kecanggihan teknologi informasi daripada dengan bank konvensional.

Beberapa kendala yang sudah dijelaskan tersebut yang menjadikan pertumbuhan bank syariah terhambat meskipun cara teoritis bank syariah mempunyai kelebihan kompetitif untuk perekonomian nasional. Karena itu, dibutuhkan kerja sama antar pemerintahan yang dijadikan sebagai penentu dari sebuah kebijakannya, masyarakat, dan bank syariah. Sehingga pembiayaan syariah akan bisa berkompetisi dengan bank

konvensional dan kemudian akan bisa memberikan pengaruh terhadap perkembangan ekonomi nasional dari perkembangan sector riil.

UMKM dalam perekonomian sekarang ini mempunyai peranan yang sangatlah penting, sebab kontribusinya pada penyerapan karyawan serta pendapatan PDB dan fleksibel serta ketangguhannya guna menghadapi krisis perekonomian yang panjang. Suatu pembahasan tersebut membuat UMKM menjadi harapan utama mengenai pertumbuhan perekonomian nasional ataupun daerah pada masa depan. Tetapi, banyak peningkatan UMKM masih terbatas di modal dan akhirnya perlu adanya pembiayaan guna menunjang pertumbuhan itu. Sebenarnya, bank syariah atau bank konvensional banyak memberikan fasilitas kredit. Namun, semua proposal *Credit Plan* yang menggiurkan hanya dapat mencukupi sekitar 60% dari kebutuhan UMKM karena tidak dapat menggunakan proposal tersebut dengan baik. Hal ini disebabkan oleh adanya pembatasan UMKM dalam memperoleh pembiayaan bank syariah, salah satunya adalah jaminan yang mereka miliki.

Sebagian besar UMKM tidak memiliki agunan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan tersebut, ketersediaan jaminan saat ini menjadi kendala bagi UMKM untuk mengajukan pembiayaan. Bank juga tidak ingin memberikan pembiayaan kepada individu dengan agunan yang tidak mencukupi.²⁸

Sulitnya UMKM mendapatkan pembiayaan dari perbankan berbasis syariah yaitu minimnya aksesibilitas UMKM terkait kurangnya legalitas serta administrasinya. Kebanyakan UMKM tidak memiliki administrasi masalah pada arus kasnya. Mereka menilai jika system bagi hasil yang diberi tawaran oleh bank syariah tersebut terbilang sangat sulit, sebab pada tiap bulannya mereka mengetahui berapa jumlah persenan dari keuntungan yang harus diberikan pada bank. Sedangkan banyak hal yang harus dilakukan oleh pemilik usaha mikro kecil serta

²⁸ Rini trisnawati, "penerapan penyusunan laporan keuangan pada usaha kecil menengah, akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas public" (Study kasus UKM mebel banyuwangi) 2015, hlm. 161

menengah mengetahui kebanyakan UMKM hanya dihandel oleh suatu individu. Tidak sama dengan bank konvensional yang menggunakan sistem bunga. Mereka tidak merasa sulit guna melakukan perhitungan lagi terhadap besarnya bagi hasil yang harus dikeluarkan setiap bulannya. Sebab, banyak angsuran yang mereka bayar telah ditentukan di awal perjanjian hutang yang memiliki jumlah tetap di setiap bulan.

Kemudian minimnya pemerataan pembiayaan bank syariah ke semua daerah serta minimnya wawasan rakyat terkait sistem bank syariah merupakan pula faktor penghambatan aksesibilitas UMKM pada bank syariah. Contohnya yaitu di kota kecil, rakyat sekitar yang memahami terkait sistem hanya sedikit serta keunggulan dari pembiayaan bank syariah juga sedikit. Sebesar mereka memahami jika bank syariah hanyalah bank yang menabungnya di kantor pos serta tidak berpikir guna mengajukan guna pembiayaan. Hal tersebut karena sangat minimnya bank syariah di wilayah tersebut. Dan akhirnya sebagian banyak UMKM masih terpusat terhadap pembiayaan konvensional yang memakai sistem bunga.

Disamping itu, penentuan harga produk pada bank syariah yang terkadang lebih besar dibanding dengan bank konvensional, membatasi pula rakyat guna mengakses produk bank syariah, sebab harga itu relative menekan nasabah. Apalagi untuk nasabah seperti UMKM yang mempunyai penghasilan tidak banyak. Dan saat ini kredit dan bunga yang diberikan oleh banyak bank konvensional tidak banyak untuk UMKM. Ini karena posisi dominan bank konvensional terutama tergantung pada usia, dan bank konvensional lebih populer daripada bank syariah.

Sebab itu, perlu terdapatnya penyelesaian guna kemudahan dalam pengaksesan pada UMKM pada pembiayaan bank syariah. Semestinya seluruh pihak terkait harus memiliki peran terhadap hal tersebut baik UMKM, pemerintahan, ataupun bank syariah. Dalam bank syariah semoga bisa lebih meningkatkan aksesnya serta bisa mensosialisasikan terkait keunggulannya secara baik dan akhirnya bank syariah bisa menjadi pendamping serta penunjang guna mengembangkan

UMKM. Sedangkan pemerintah bisa menyediakan fasilitas pelatihan manajemen untuk UMKM supaya kemampuan terkait pengelolaan administrasi usaha bisa bertambah.

E. LAPORAN KEUANGAN UMKM YANG SESUAI DENGAN SAK EMKM

1. Laporan Keuangan Entitas Berdasarkan SAK EMKM

Informasi posisi keuangan entitas mencakup dari informasi terkait ekuitas entitas di tanggal tertentu, asset, liabilitas, serta disajikan pada laporan posisi keuangan. Unsur-unsur itu dijelaskan sesuai dengan SAK EMKM, yaitu:²⁹

- a) Asset merupakan mengacu pada sumber daya yang dihasilkan karena kejadian dimasa lalu serta kemanfaatan dari ekonomi dimasa mendatang di harapkan akan didapatkan entitas.
- b) Libialitas merupakan kewajiban terkini entitas yang muncul melalui kejadian masa lampau timbul yang penuntasannya menjadikan arus keluar, atas sumber daya entitas yang memuat akan kemanfaatan pada perekonomian.
- c) Ekuitas merupakan hak residual terhadap asset sesudah dikurangkan semua libialitasnya.

Dasar Pengukuran unsur dari laporan keuangan pada SAK EMKM merupakan biaya historis. Biaya historis sebuah hasil kekayaan merupakan sejumlah angka setara kas ataupun kas yang dikeluarkan guna mendapatkan kekayaan itu ketika perolehan. Biaya historis sebuah liabilitas yaitu dengan jumlah setara kas atau kas yang diterima.³⁰

Pengakuan unsur laporan keuangan ialah tahap penciptaan sebuah pos pada laporan keuangan yang sesuai dengan kriteria:

²⁹ Dedy Kurniawansyah, "*penerapan pencatatan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM pada UMKM*" Prosiding Seminal Nasional, 17 desember 2016

³⁰ Pratiwi sariningsih, "*standart akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas pada usaha kecil dan menengah*" JAK, Vol.1, No. 1, hlm.94

1) Manfaat ekonomi yang berkaitan dengan beban, penghasilan, liabilitas, pos-pos aset bisa dipastikan akan mengalir melalui entitas.

2) Biaya posisi tersebut dapat diukur serta dapat diandalkan.

Pengungkapan dibutuhkan saat kepatuhan terhadap persyaratan pada SAK EMKM tidak mencukupi untuk pengguna guna melihat dampak dari transaksi, keadaan lain serta peristiwa.

Penyajian wajar laporan keuangan memberikan syarat entitas guna melakukan penyajian informasi yang sesuai, keterpahaman, representative benar, serta keterbandingan. Entitas menyajikan kelengkapan pada laporan keuangan di akhir semua periode laporan. Pelaporan keuangan harus mencakup:

- 1) Catatan terhadap laporan keuangan yang memuat rincian pos serta tambahan yang sesuai.
- 2) Laporan laba rugi selama periode.
- 3) Laporan posisi keuangan di akhir periode.

Laporan posisi keuangan entitas meliputi pos-pos:

- a. Ekuitas
- b. Utang bank
- c. Utang usaha
- d. Asset tetap
- e. Persediaan
- f. Piutang
- g. Setara kas serta kas

Laporan keuntungan kerugian entitas meliputi pos-pos di bawah:

- a. Beban pajak
- b. Pendapatan
- c. Beban keuangan

Catatan mengenai laporan keuangan berisi:

- a. Sebuah pernyataan jika laporan keuangan sudah dibuat berdasarkan SAK EMKM
- b. Ikhtisar kebijakan akuntansi
- c. Rincian pos serta informasi ditambahkan dalam pemaparan transaksi penting serta material dan kemudian memiliki manfaat untuk mempelajari laporan keuangan.

2. Contoh Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM

Di bawah ini adalah contoh format dari laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM:

Format Laporan Posisi Keuangan

PT. XXX LAPORAN POSISI KEUANGAN 31 DESEMBER 201x DAN 201x			
Asset	Catatan	201x	201x
Kas dan setara kas			
Kas	3	XXX	XXX
Giro	4	XXX	XXX
Deposito	5	XXX	XXX
<i>Jumlah kas dan setara kas</i>		XXX	XXX
Piutang usaha			
Persediaan	6	XXX	XXX
Beban dibayar dimuka	7	XXX	XXX
Aset tetap		XXX	XXX
Akumulasi Penyusutan		(XXX)	(XXX)
JUMLAH ASET		XXX	XXX
LIABILITAS			
Utang usaha		XXX	XXX
Utang bank	8	XXX	XXX
JUMLAH LIABILITAS		XXX	XXX
EKUITAS			
Modal		XXX	XXX
Saldo laba (defisit)	9	XXX	XXX
JUMLAH EKUITAS		XXX	XXX
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		XXX	XXX

Contoh Hasil Laporan Posisi Keuangan:

TOKO BAROKAH LAPORAN POSISI KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2019		
ASET		
Kas	7.475.000	
Piutang usaha	600.000	
Peralatan	4.500.000	
Akum. Penyusutan Peralatan	225.000	
Kendaraan	12.500.000	
Akum. Penyusutan kendaraan sewa dibayar dimuka	1.100.000	
Total Aset		25.750.000
LIABILITAS		
Utang usaha	500.000	
utang bank	2.000.000	
utang bunga	150.000	
utang gaji	250.000	
Total Liabilitas		2.900.000
EKUITAS		
Modal	22.500.000	
laba tahun berjalan	650.000	
Prive	300.000	
TOTAL EKUITAS		22.850.000
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		25.750.000

Format Laporan Laba Rugi

PT.XXX LAPORAN LABA RUGI PER 31 DESEMBER 201x			
PENDAPATAN	Catatan	201x	201x
Pendapatan lain-lain		XXX	XXX
Pendapatan usaha		XXX	XXX
Jumlah Pendapatan		XXX	XXX
BEBAN			
Beban lain-lain		XXX	XXX
Beban usaha		XXX	XXX

Jumlah Beban		XXX	XXX
Laba (Rugi) sebelum pajak penghasilan		XXX	XXX
beban pajak penghasilan		XXX	XXX
Laba (Rugi setelah pajak penghasilan)		XXX	XXX

Contoh Laporan laba Rugi:

TOKO BAROKAH LAPORAN LABA RUGI PER 31 DESEMBER 2019		
PENDAPATAN		
Pendapatan lain-lain	-	
Pendapatan usaha	5.625.000	
Jumlah Pendapatan		5.625.000
BEBAN		
Beban sewa	150.000	
Beban gaji	1.300.000	
Beban Listrik dan telepon	300.000	
Beban Perlengkapan	450.000	
Beban penyusutan kendaraan	1.150.000	
Beban penyusutan peralatan	455.000	
Beban Administrasi	440.000	
Beban bunga	325.000	
Beban Lain-lain	250.000	
Total Beban		4.370.000
LABA SEBELUM PAJAK		1.225.000

Format Catatan Atas Laporan Keuangan

PT.XXX CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 201x DAN 201x	
1. UMUM	Entitas tersebut didirikan di Jakarta dengan No. xxx pada akta. Pada 1 Januari 2018 dan desain di depan kantor notaris. Tanggal persetujuan menteri hukum serta HAM No.xxx 2018 tanggal 31 Januari 2018. Entitas beroperasi pada manufaktur, entitas menengah, kecil, serta mikro selaras undang-undang No.20 tahun 2008, domisili entitas di jalan xxx Jakut.
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING	
a. Persyaratan Kepatuhan	laporan keuangan dibuat memakai SAK Entitas kecil, Menengah, serta Mikro
b. Dasar Penyusunan	Dasar penyusunan laporan keuangan yaitu biaya historis serta memakai dasar aktual. Rupiah merupakan mata uang yang disajikan guna penyusunan laporan keuangan.
c. Piutang Usaha	Piutang usaha disajikan senilai total tagihan
d. Persediaan	Biaya persediaan bahan baku mencakup biaya angkut pembelian serta pembelian. Biaya koveksi mencakup overhead serta biaya tenaga kerja langsung. Overhead tetaplah dialokasikan ke biaya konveksi sesuai dengan kapasitas produksi normal. Overhead variabel ditempatkan dalam unit produksi sesuai dengan penggunaan aktual fasilitas produksi. Entitas memakai rumus biaya persediaan rata-rata.
e. Aset Tetap	
f. Pengakuan pendapatan dan beban	Pendapatan penjualan diakui saat tagihan diluncurkan ataupun pengiriman dilaksanakan pada konsumen. Beban diakui ketika terjadi.
g. pajak penghasilan	pajak penghasilan ikut ketentuan perpajakan yang ada di Indonesia

3.	KAS	201x	201x
	Kas kecil Blitar-Rupiah	xxx	xxx
4.	GIRO	201x	201x
	Pt. Bank xxx-Rupiah	xxx	xxx
5.	DEPOSITO	201x	201x
	PT Bank xxx-Rupiah	xxx	xxx
	Suku Bunga Deposito: Rupiah	201x	201x
		4,50%	5,00%
6.	PIUTANG USAHA	201x	201x
	Toko B	xxx	xxx
	Toko A	xxx	xxx
	Jumlah	xxx	xxx
7.	BEBAN DIBAYAR DIMUKA	201x	201x
	Lisensi serta perizinan	xxx	xxx
	Sewa	xxx	xxx
	Asuransi	xxx	xxx
	Jumlah	xxx	xxx
8.	UTANG BANK		
	Di tanggal 4 Maret 2019, entitas mendapatkan pinjaman kredit modal kerja dari PT bank ABC dengan maksimal kredit Rp.x x x. Suku bunga efektif ialah 11% pertahun dan akan berakhir pada tanggal 19 April 2019. Pinjaman tersebut dijamin dengan sebidang tanah milik entitas.		
9.	SALDO LABA		
	Saldo laba adalah akumulasi selisih beban serta penghasilan, sesudah dikurangi dengan distribusi pada pemilik		
10.	PENDAPATAN PENJUALAN	201x	201x
	Retur penjualan	xxx	xxx
	Penjualan	xxx	xxx
	Jumlah	xxx	xxx
11.	BEBAN LAIN-LAIN	201x	201x
	Lain-lain	xxx	xxx
	Bunga pinjaman	xxx	xxx
	Jumlah	xxx	xxx
12.	BEBAN PAJAK PENGHASILAN	201x	201x
	Pajak penghasilan	xxx	xxx

8. UTANG BANK		
	Di tanggal 4 maret 2019, entitas mendapatkan pinjaman kredit modal kerja dari PT bank ABC dengan maksimal kredit Rp.x x x. Suku bunga efektif ialah 11% pertahun dan akan berakhir pada tanggal 19 April 2019. Pinjaman tersebut dijamin dengan sebidang tanah milik entitas.	
9. SALDO LABA	Saldo laba adalah akumulasi selesih beban serta penghasilan, sesudah dikurangi dengan distribusi pada pemilik	
10. PENDAPATAN PENJUALAN	201x	201x
Retur penjualan	xxx	xxx
Penjualan	xxx	xxx
Jumlah	xxx	xxx
11. BEBAN LAIN-LAIN	201x	201x
Lain-lain	xxx	xxx
Bunga pinjaman	xxx	xxx
Jumlah	xxx	xxx
12. BEBAN PAJAK PENGHASILAN	201x	201x
Pajak penghasilan	xxx	xxx

Contoh Catatan Atas Laporan Keuangan

TOKO BAROKAH CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 201x DAN 201x	
1. UMUM	
	Toko Barokah ini didirikan di Jembrana tahun 2019. Entitas bergerak di bidang usaha Perdagangan. Entitas memenuhi kriteria sebagai entitas, mikro, kecil, dan menengah sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2008. Entitas berdomisili di Jalan Pattimura no. 12
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING	
a. Persyaratan Kepatuhan	laporan keuangan dibuat memakai SAK Entitas kecil, Menengah, serta Mikro
b. Dasar Penyusunan	Dasar penyusunan laporan keuangan yaitu biaya historis serta memakai dasar akrual. Rupiah merupakan mata uang yang disajikan guna penyusunan laporan keuangan
c. Piutang Usaha	Piutang usaha disajikan senilai total tagihan
d. Aset Tetap	Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehannya jika aset tersebut dimiliki secara hukum oleh entitas. Aset tetap disusutkan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai residu.
e. Pembelian	Pembelian disajikan sebesar jumlah yang dibayarkan
f. Pengakuan Pendapatan dan Beban	Pendapatan jasa diakui ketika tagihan diterbitkan atau pembelian sudah selesai dan sudah diambil oleh pelanggan
3. KAS	
Kas	Rp7.475.000
4. PITANG USAHA	
Piutang usaha	Rp600.000

5. UTANG USAHA	
Utang usaha	Rp 500.000
6. UTANG BANK	
Utang bank	Rp 2.000.000
7. UTANG GAJI	
Utang gaji	Rp 250.000
8. UTANG BUNGA	
Utang bunga	Rp 150.000
9. SALDO LABA	
Saldo laba merupakan akumulasi selisih antara pendapatan dan beban Laba sebelum pajak Rp650.000	
10.PENDAPATAN JASA	
Pendapatan jasa	Rp 5.625.000
11.PEMBELIAN	
Pembelian	Rp 1.400.000
12.BEBAN	
Beban sewa	Rp 150.000
Beban gaji	Rp 1.300.000
Beban Listrik dan telepon	Rp 300.000
Beban Perlengkapan	Rp 450.000
Beban Penyusutan kendaraan	Rp 1.150.000
Beban penyusutan peralatan	Rp 455.000
Beban Administrasi	Rp 440.000
Beban bunga	Rp 325.000
Beban Lain-lain	Rp 250.000
Total Beban	Rp4.370.000

Dengan memenuhi persyaratan SAK EMKM pada pembuatan laporan keuangan, pemerintah mengharapkan bisnis UKM / UMKM di Indonesia bertambah berkembang.

F. LATIHAN SOAL

1. Sebutkan karakteristik usaha mikro dalam perspektif islam?
1. Diketahui data perusahaan PT.ABC untuk periode akhir Desember 2019:
Pendapatan jasa @60.000.000

Pendapatan bunga	@300.000
Beban gaji	@15.500.000
Beban sewa	@3.500.000
Beban iklan	@300.000
Beban perlengkapan	@2.150.000
Beban listrik dan air	@1.500.000
Beban asuransi	@1.500.000
Beban administrasi	@400.000
Beban bunga	@300.000

Ditanya:

Dari data yang dijelaskan diatas buatlah laporan laba rugi pada laporan pada perusahaan per 31 Desember 2019!

2. Sesuai dengan data perusahaan PT.ABC per Desember 2019 diatas. Buatlah laporan laba rugi perusahaan tersebut jika diketahui pajak penghasilannya 15%!
3. Pada tanggal 31 Desember 2019 CV. ADI TAMA menyajikan data-data berikut:

Kas	Rp1.000.000	
Peralatan	Rp900.000	
Akum. Penyus. Peralatan	Rp230.000	
Modal		Rp1.500.000
Prive	Rp250.000	
Utang usaha		Rp1.130.000
Pendapatan		Rp2.550.000
Beban perlengkapan	Rp550.000	
Beban sewa	Rp650.000	
Beban iklan	Rp300.000	
Beban gaji	Rp800.000	
Beban lain-lain	Rp725.000	
Utang gaji		Rp225.000
TOTAL	<u>Rp5.405.000</u>	<u>Rp5.405.000</u>

Ditanya:

Dari data diatas buatlah laporan posisi keuangan per 31 Desember 2019!